BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dapat menciptakan manfaat besar bagi dunia usaha. Perkembangan IPTEK yang begitu pesat menciptakan sebuah sistem yang dapat digunakan pelaku usaha untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, selain memberikan dampak positif perkembangan zaman yang begitu pesat juga dapat memberikan dampak negatif dan permasalahan yang signifikan. Salah satu permasalahan dalam bidang akuntansi yang sering terjadi adalah masalah kecurangan *(fraud)* yang dimana kecurangan ini bersifat kompleks yang dapat merugikan pihak tertentu (Widyawati, 2018).

Kecurangan akuntansi (*fraud)* menjadi suatu permasalahan yang selalu menyita perhatian publik (Wahyuni dan Tiara, 2018). Widyawati (2018) menyatakan bahwa kerugian akuntansi juga tidak dapat dianggap hal biasa karena seringkali kerugian atas kecurangan ini bernilai material yang dapat membuat beberapa pihak sangat dirugikan. Akmal (2012) menyatakan bahwa kecurangan di rancang untu memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung akan dapat merugika pihak lain. Apabila kecurangan tersebut dibiarkan begitu saja tentunya akan mejadi hal yng sangat merugikan bagi suatu organisasi. Tinginya intesitas praktik kecurangan, penipuan dan penggelapan yang terjadi pada suatu intitusi publi denga segala modus nya dari yang paling sedehana hingga yang sangat canggih dan rumit,

seharusnya menyadarka seluruh pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara konsiten dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat (Zarlis, 2018).

Kecurangan akutansi tidak hanya terjadi pada dunia usaha ataupada sektor swasta. Namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintahan. Sebagai suatu organisasi sektor publik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanaka amanatuntuk mejalankan tugas pemerintahn berdasarkan peraturan. Pemerintah daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana umum memiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang betugas dalam bidan peneriman, belanjaa daerah, pembiayaan, dan aset daerah dengan tujuan mampu untuk mengelola keuangan dan aset- aset daerah. BPKAD merupakan unsur penunjang dalam urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan kegiatan di bidang pemerintahan, BPKAD berlandaskan atas visi berikut "Profesional dan Prima dalam Mengelola Keuangan dan Aset Daerah Menuju Karangasem Cerdas, Bersih dan Bemartabat Belandaskan *Tri Hita Karana*". Visi tersebut mengandung unsur profesionalisme, prima dan mengelola keuangan dan aset daerah. Profesional berarti sebuah kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam mellaksanakan kewenangaan, tugas dan fungsi dengan komitmen, tanggungjawab, kritis dan cepat tanggap. Prima dalam artian pelayanan yang diberikan dalam bidang administratif secara akomodatif, efektif dan efisien. Selain profesional dan prima, unsur lainnya yang terkandung adalah mengelola keuangan dan aset daerah.

Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2018 BPKAD Kabupaten Karangasem dipaparkan mengenai isu strategis untuk mendukung tecapainya visi dan misi pembanguunan daerah dalam janka waktutertentu yang tekait dengan perencanaan danpelaksanaannya. Beberapa permasalahan BPKAD Kabupaten Karangasem diantaranya: (1) belum sempurnanya regulasi perpajakan untuk peningkatan pendapatan pajak, (2) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, (3) kondisi aset daerah yang belum sepenuhnya tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) percepatan penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala.

Pemerintah daerah tentunya mengharapkan Pendapatan Asli Daerah nya meningkat tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan yang diterapkan telah terlaksana dengan secara optimal. Perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 6 kabupaten/ kota di Bali tahun 2016 dan 2017 disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Bali
Tahun 2016 dan 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Persentase Peningkatan (Penurunan)
		2016	2017	
1	Kab. Jembrana	114,533,487.00	121,342,475.00	6%
2	Kab. Tabanan	318,083,799.00	426,635,751.00	34%
3	Kab. Badung	3,563,459,640.00	4,172,457,396.00	17%
4	Kab. Gianyar	529,864,618.00	662,753,475.00	25%
5	Kab. Klungkung	134,142,054.00	153,210,776.00	14%
6	Kab. Bangli	104,829,402.00	104,592,163.00	0%
7	Kab. Karangasem	318,083,799.00	198,575,057.00	-38%
8	Kab. Buleleng	282,113,900.00	455,195,426.00	61%
9	Kota Denpasar	807,050,192.00	1,008,710,712.00	25%
10	Provinsi Bali	3,041,195,258.00	3,398,472,278.00	12%

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Persentase Peningkatan (Penurunan)
		2016	2017	
Jumlah		9,213,356,149.00	10,701,945,509.00	16%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 untuk seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami peningkatan sebesar 16% dari tahun 2016. Peningkatan yang paling signifikan terjadi di Kabupaten Buleleng dari Rp 282.113.900 menjadi Rp 455.195.426 di tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 61%. Sementara itu, Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 mengalami penurunan PAD yang cukup signifikan dari Rp 318.083.799 menjadi Rp 198.575.057 di tahun 2017, mengalami penurunan sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Karangasem masih cukup rendah karena PAD nya menurun signifikan di tahun 2017. Selain perbandingan tahun 2016 dan 2017 dapat juga dilihat perbandingan PAD pada tahun 2017 dan 2018 yang disajikan pada table 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 2017 dan 2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Persentase Peningkatan (Penurunan)
		2017	2018	
1	Kab. Jembrana	121,342,475.00	126,477,267.00	4%
2	Kab. Tabanan	426,635,751.00	363,370,469.00	-15%
3	Kab. Badung	4,172,457,396.00	4,555,716,407.00	9%
4	Kab. Gianyar	662,753,475.00	770,204,849.00	16%
5	Kab. Klungkung	153,210,776.00	186,974,284.00	22%
6	Kab. Bangli	104,592,163.00	122,686,254.00	17%
7	Kab. Karangasem	198,575,057.00	200,361,247.00	1%
8	Kab. Buleleng	455,195,426.00	335,555,494.00	-26%
9	Kota Denpasar	1,008,710,712.00	940,110,335.00	-7%

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Persentase Peningkatan (Penurunan)
		2017	2018	
10	Provinsi Bali	3,398,472,278.00	3,718,499,635.00	9%
Jumlah		10,701,945,509.00	11,319,956,241.00	6%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.2, terlihat bahwa perbandingan PAD tahun 2017 dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa secara keseluruhan adanya peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang sangat drastis. PAD Karangasem mengalami penurunan Rp 63,9 miliar lebih dari target induk tahun 2019 sebesar Rp 276 miliar lebih. Turunnya PAD bertanda langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal. BKPAD dinilai jarang turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak), sehingga adanya kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan PAD tersebut (Tribunnews, 2019).

Struktur PAD Kabupaten Karangasem terdiri dari pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolan kekayaan daerah yang di pisahkan dan PAD lainya yang sah. Kinerja pencapaian target PAD Kabupaten Karangasem tahun 2018 disajikan pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Tingkat Capaian PAD Tahun Anggaran 2018

Jenis PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pajak Daerah	116.501.484.429,82	91.995.240.970,84	78,96
Retribusi Daerah	18.362.770.000,00	13.199.321.374,00	71,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.741.521.666,18	10.750.650.743,67	91,56
Lain-lain PAD yang Sah	87.394.223.904,00	84.416.524.743,28	96,59
Jumlah	234.000.000.000,00	200.361.737.831,79	85,62

Sumber: Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2018

Tingkat capaian PAD tahun 2018 tertinggi diperoleh dari sektor lainnyadari PAD yang sah. Sementara PAD Kabupaten Karangasem terendah di peroleh dari retribusi daerah. Salah satu sumber PAD Kabupaten Karangasem dari pajak daerah sejalan dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Karangasem. Pendapatan Asli Daerah tentunya memiliki kontribusi dalam pendapatan daerah untuk pembangunan di Kabupaten Karangasem yang dapat dilihat dari segi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berikut disajikan kontibusi realisasi PAD pada pendapatan daerah disajikan pada tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari Tahun 2015-2017

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Persentase (%)
2015	1.384.754.059.466	242.486.180.423	17,51
2016	1.463.867.316.131	232.602.570.475	15,89
2017	1.525.846.347.781	198.575.058.249	13,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2018

Dilihat dari segi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan pendanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih sangat ketergantungan kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Lebih khusus lagi apabila dilihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya, halini dikarenakan total pendapatan daerah sedangkan PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada sisi perkembangan penerimaan PAD mengalami penurunan yang disebabkan penurunan potensi pajak sebagai akibat erupsi Gunung Agung.

Menurunnya PAD disebabkan target di beberapa sektor pajak dan retribusi tidak terealisasi dengan baik. Seperti pajak dari batuan mineral bukan logam, retribusi tempat rekreasi olahraga defisit hingga lebih dari Rp 10 miliar yang dimana di targetkan sebesar Rp 16,2 miliar lebih di induk 2019. Banyak pengusaha

batu mineral bukan logam yang pajaknya tidak dipungut karena tak berizin. Sebagian besar truk membeli pasir dan batu di perusahaan tak berizin karena harganya lebih murah (Tribunnews, 2019).

Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana bersama Wakil Ketua, I Nengah Sumardi dan Komisi III tersebut, Dewan mendapati puluhan truk lalu lalang megangkut material pasir. Yang menjadi sorotan justru setelah di cek kepos pengawasan pajak, bukannya menemukan faktur pajak, dewan justru mendapati puluhan kupon putih menyerupai karcis parkir yang di dalamnya tertulis sejumlah nama tokoh sebagai penanggungjawabnya (beritabali.com, 2019). Bahkan Ketua DPRD Karangasem menuding BPKAD belum becus mengamankan aset-aset daerah yang berpotensi menghasilkan seperti galian C (baliexpress, 2019). Hal ini tentunya mengindikasikan adanya tindak kecurangan yang menyebabkan menurunnya PAD Kabupaten Karangasem karena pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai aksi nyata BPKAD menyikapi penurunan PAD banyak upaya yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan PAD melalui beberapa sektor sumber PAD tersebut. Peningkatan pelayanan perpajakan terus dilakukan dengan *Modernisasi* Perpajakan Daerah melalui Sistem Online Perpajakan sebagaimana Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Sistem *online* pajak meliputi *online* pembayaran, *online* pelaporan SPTPD, *online* pelaporan/ perekaman data transaksi, dan *online* informasi dokumen perpajakan daerah. Bupati Karangasem mengapresiasi pelaksanaan *Gathering* Pajak Hotel dan Restoran ini agar terus dapat dilakukan sehingga adanya sinergitas dan optimalisasi pemungutan perpajakan

daerah (BPKAD, 2019). Melalui modernisasi sistem perpajakan tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan pajak daerah.

Kecurangan dapat dicegah dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong timbulnya kecurangan *(fraud)* itu sendiri. Penelitian ini mengkaji mengenai pencegahan *fraud* yangdapat dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menhilangkan kecurangan yang terjadi, sehinga jelas memiliki hubungan dengan *fraud diamond* yang menjelaskan ada empat hal yang dapat memengaruhi seorang untuk melakukan kecurangan, sehingga dalam penelitin ini akan dibahas bagaimana mencegah kecurangan tersebut dengan beberapa variabel yang akan diuji yakni komitmen organisasi, budaya *Tri Hita Karana* dan *whistlebloowing system.*

Suatu kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan komitmen organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan bersama. Komitmen organisasi mereflekasikan loyalitas karyawan dan proses bekelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikn perhatian terhadap organisasi serta keyakinan untuk menerima nilai dan tujuan organisasi. Akan tetapi, individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya. Kurangnya komitmen pegawai terhadap organisasi dapat dipicu karena adanya kebutuhan pribadi yang mendesak pegawai lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang dapat menghambat tujuan organisasi (Laksamana, 2019). Apabila dikaitkan dengan visi BPKAD Kabupaten Karangasem yang dimana salah satu unsurnya adalah profesionalisme yang didalamnya terdapat komitmen dan tanggungjawab individu

dalam bekerja. Berlanjutnya programnyang direncanakan padavrencanaxkerjactidak terlepas dari pemahaman dan komitmen yang sama seluruh *stakeholder* pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan.

Penelitian mengenai komitmen organisasi telah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Dewi (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruhpositif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayutri dan Baihaqi (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak bepengaruh trhadap pencegahan *fraud*.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan untk mecegah terjadinya kecurangan adalah penerapan budaya organisasi. Nilai- nilai budaya berfungsii menjadi dasar dalam berperilaku bagi setiap bagian yang ada dalam suatu organisasi untuk melangkah dalam aktivitasnya (Widyawati, 2018). Salah satu budaya organisasi yang berbasis kearifan lokal yang dapat memberikan rasa jera dan rasa malu terhadap perbuatannya berupa budaya lokal *Tri Hita Karana*. Konsep THK menjadi sebuah konsep harmonisasi hubungan yang di jaga dan melekat di dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali meliputi: *prahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan antar manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) yang sumbernya dari kitab suci agama Hindu Bhagawadd Gita (Riana, 2010). Melalui penerapan

budaya organisasi ini tentunya individu akan berupaya menjaga hubungan yang baik, sehingga akan menghilangkan niat seseorang untuk melakukan suatu kecurangan.

Maka dengan demikian suatu instansi pemerintah juga harus memegang erat konsep THK ini agar mampu menjadi tumpuan untuk tidak bertindak curang dalam bekerja. Semakin kuat budaya THK yang diterapkan pegawai tentunya akan semakin rendah niat untuk melakukan kecurangan karena dengan THK yang baik akan meciptakan hbungan yang harmonis antara manusia dengan pencipta, sesame manusia dan manusia dengan lingkungan. Apabila dikaitkan dengan visi BPKAD Kabupaten Karangasem bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja denganbudaya *Tri Hita Karana* yang dimana hal ini ada pada visi intstansi tersebut.

Selain budaya organisasi dan komitmen organisasi, upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan dalam suatu entitas atau instansi. Nugroho (2015) menyatakan bahwa penanganan *whistlebloowing system* yangbaik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritassnya.

Penelitian mengenai *whistlebloowing system* pernah dilakukan oleh Wardana (2017) yang memperoleh hasil bahwa *whistlebloowing system* berpengaruh positif dan siggnifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Wahyuni dan Tiara (2018) yang menyatakan bahawa *whistlebloowing system* memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sementara itu, hasil penelitian Nugroho (2015) memperoleh hasil berbeda

bahwa *whistlebloowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud.* Selviyana (2017) juga menyatakan bahwa *whistlebloowing system* tidak berpengaruuh terhadap pencegahan *fraud* melalui perilaku etis.

Sesuai pemaparan di atas bahwa masih adanya potensi kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan PAD Kabupaten Karangasem. Kecurangan ini terjadi karena masih rendahnya pencegahan yang dilakukan. Dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih kurangnya komitmen untuk menjaga organisasi. Hasil observasi peneliti ke tempat penelitian dapat dikatakan bahwa organisasi masih kurang optimal dalam menerapkan budaya *Tri Hita Karana*. Hal ini terlihat dari tidak diterapkan konsep *palemahan* yang dalam hal ini kurangnya partisipasi pegawai dalam ikutsertaan dalam menjaga lingkungan, sehingga tidak terpancar suasana kerja yang kondusif. Selain itu, secara statistik pada Kabupaten/Kota di Bali hanya PAD Kabupaten Karangasem yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan visi misi yang telah dikaji sebelumnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widyawati (2018) dengan judul "Pengaruh *Whistleblowing System*, Moralitas Aparat, dan Budaya *Tri Hita Karana* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung". Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widyawati (2018) adalah pada variabel dependen yakni pencegahan *fraud*. Untuk variabel independen yang sama yakni *whistlblowing system* dan budaya *Tri Hita Karana*. Sementara itu, perbedan penelitian ini dengan penelitian Widyawati (2018) adalah ditambahkannya variabel komitmen organisasi pada penelitian ini. Mengenai tempat dan waktu penelitian juga berbeda mengingat bahwa hasil

penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada tempat yang berbeda apalagi pada waktu yang berbeda, sehingga diperlukan adanya penelitian kembali untuk menguji variabel-variabel yang pernah diteliti oleh Widyawati (2018).

Peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pencegahan *fraud* didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bidang pariwisata di Karangasem mulai berkembang begitu pesat sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana* berlandaskan budaya dan spritual. Secara rasional, hal ini memungkinkan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Karangasem sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi, sesuai data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PAD Kabupaten Karangasem menurun signifikan dari tahun ketahun. Hal menarik dari penjelasan ini adalah adanya kecenderungan terjadinya kecurangan yang menyebabkan penurunan PAD dari tahun ke tahunnya.

Empat sektor sumber PAD Kabupaten Karangasem seluruhnya penting untuk diperhatikan pemerintah daerah guna optimalisasi PAD untuk kesejahteraan masyarakat Karangasem. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian pada BPKAD Karangasem disamping data statistik mengenai pendapatan asli daerah Karangasem yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, mengenai ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya juga memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pencegahan *fraud* dengan mengangkat judul **"Pengaruh Komitmen Organisasi, Perspektif Budaya *Tri Hita Karana*, dan *Whistlebloowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1) Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem mengalami penurunan signifikan yakni mencapai 38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak signifikan yakni hanya sebesar 1%.
3) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 234.000.000.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 200.361.737.831,79 atau hanya sebesar 85,62% dari PAD yang ditargetkan.
4) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
5) Terdapat beberapa permasalahan BPKAD Kabupaten Karangasem diantaranya: (a) belum sempurnanya regulasi perpajakan untuk peningkatan pendapatan pajak, (b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, (c) kondisi aset daerah yang belum sepenuhnya tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (d) percepatan penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dan agar penelitian dapat terfokuskan dengan baik, maka peneliti membatasi penelitian hanya menganalisis

pengaruh tiga variabel yaitu komitmen organisasi, perspektif budaya *Tri Hita Karana*, dan *whistlebloowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?

1.4.2 Apakah perspektif budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?

1.4.3 Apakah *whistlebloowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pada pencegahan *fraud*.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh perspektif budaya *Tri Hita Karana* pada pencegahan *fraud*.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh *whistlebloowing system* pada pencegahan *fraud*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi utamanya mengenai pencegahan *fraud*, sehingga kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dan acuan untuk mengkaji penelitian yang sejenis. Penelitian ini juga dapat memberikan rasional bahwa budaya jujur dan etika yang tinggi dapat mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan analisis menarik mengenai teori *fraud*, teori GONE, komitmen organisasi, *Tri Hita Karana* dan *whistleblowing system*.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman khususnya mengenai *fraud* dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Selain itu juga dapat melatih mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan responden dalam melakukan pengumpulan data penelitian.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangan pikiran tentang pengaruh komitmen organisasi, budaya *Tri Hita Karana* dan *whistlebloowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

c. Bagi BPKAD Kabupaten Karangsem

Melalui penelitian ini diharapakan BPKAD Kabupaten Karangasem dapat mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan meminimalisir terjadinya kecurangan yang menyebabkan semakin menurunnya PAD. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi, sehingga dapat memperbaiki pengelolaan keuangan guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA